

BAB II

PENDIDIKAN MULTIKULTURAL

A. Pengertian Pendidikan Multikultural

Sebagaimana dikutip oleh Chairul Mahfud meminjam pendapat Andersen dan Cusher (1994: 320), bahwa pendidikan multikultural dapat diartikan sebagai pendidikan mengenai keragaman kebudayaan. Kemudian, James Banks (1993: 3) mendefinisikan Pendidikan Multikultural sebagai pendidikan untuk *People of Color*. Artinya, pendidikan multikultural ingin mengeksplorasi perbedaan sebagai keniscayaan (anugerah tuhan/*sunnatullah*). Kemudian bagaimana kita mampu menyikapi perbedaan tersebut dengan penuh toleran dan semangat egaliter.¹

Sejalan dengan pemikiran di atas, Muhaemin el Ma'hady berpendapat bahwa secara sederhana pendidikan multikultural dapat didefinisikan sebagai pendidikan tentang keragaman kebudayaan dalam merespon perubahan demografis dan kultural lingkungan masyarakat tertentu bahkan dunia secara keseluruhan (global).²

Pendidikan multikultural memandang manusia sebagai makhluk makro yang tidak akan terlepas dari akar budaya dan kelompok etnisnya.³ Secara generik, pendidikan multikultural memang sebuah konsep yang dibuat dengan konsep untuk menciptakan persamaan peluang bagi semua siswa yang berbeda ras, etnis, kelas sosial dan kelompok budaya.

¹Choirul Mahfud, *Pendidikan Multikultural*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 168

²Ibid, 168

³Ibid, 187

Pada dasarnya, pendidikan multikultural adalah pendidikan yang menghargai perbedaan. Pembelajaran berbasis multikultural di era globalisasi ini merupakan dasar pokok yang harus dimiliki oleh para pendidik, karena dalam pembelajaran ini pendidik harus merubah cara pandang mereka terhadap obyek pembelajaran (anak didik) tidak hanya dianggap sebagai individu tetapi harus ditempatkan sebagai warga lokal dan global.

Istilah pendidikan multikultural dapat digunakan, baik pada tingkat diskriptif dan normatif yang menggambarkan isu-isu dan masalah-masalah pendidikan yang berkaitan dengan masyarakat multikultural. Lebih jauh juga mencakup tentang pertimbangan terhadap kebijakan-kebijakan dan strategi-strategi pendidikan dalam masyarakat multikultural.

Dalam konteks diskriptif, maka pendidikan multikultural seyogyanya berisikan tentang tema-tema mengenai toleransi, perbedaan ethno-cultural dan agama, bahaya diskriminasi, penyelesaian konflik dan mediasi, hak asasi manusia, demokratisasi, pluralitas, kemanusiaan universal, dan subjek-subjek lain yang relevan.

Pendidikan multikultural adalah suatu pendekatan progresif untuk melakukan transformasi pendidikan yang secara menyeluruh membongkar kekurangan, kegagalan, dan praktik-praktik diskriminasi dalam proses pendidikan.

Pendidikan multikultural juga dapat didefinisikan sebagai pendidikan untuk atau tentang keragaman kebudayaan dalam merespon perubahan demografis dan kultur lingkungan masyarakat tertentu bahkan dunia secara

keseluruhan. Hal ini sejalan dengan pendapat Paulo Freire,⁴ Pendidikan bukan merupakan menara gading yang berusaha menjauhi realitas sosial dan budaya. Pendidikan menurutnya, harus mampu menciptakan tatanan masyarakat yang hanya mengagungkan prestise sosial sebagai akibat kekayaan dan kemakmuran yang dialaminya.

Pendidikan multikultural adalah untuk membantu semua siswa agar memperoleh pengetahuan, sikap dan keterampilan yang diperoleh dalam menjalankan peran-peran seefektif mungkin pada masyarakat demokratis-pluralistik, serta diperlukan untuk berinteraksi, negoisasi dan komunikasi dengan warga kelompok lain agar tercipta sebuah tatanan masyarakat bermoral yang berjalan untuk kebaikan bersama.⁵

Pendidikan multikultural mengakui adanya keragaman etnik dan budaya masyarakat suatu bangsa. Terdapat tiga prinsip pendidikan multikultural yang dikemukakan oleh Tilaar. *Pertama*, pendidikan multikultural didasarkan pada pedagogik kesetaraan manusia (*equity pedagogy*).

Kedua, pendidikan multikultural ditujukan kepada terwujudnya manusia Indonesia yang cerdas dan mengembangkan pribadi-pribadi Indonesia yang menguasai ilmu pengetahuan dengan sebaik-baiknya.

Ketiga, prinsip globalisasi tidak perlu ditakuti apabila bangsa ini mengetahui arah serta nilai-nilai baik dan buruk yang dibawanya.⁶

⁴Paulo Freire, *Politik Pendidikan: Kebudayaan, kekuasaan dan Pembebasan*, Terj. Agung Prihantoro (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 19.

⁵Choirul Mahfud, *Pendidikan Multikultural*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006), 202-203.

⁶H.A.R Tilaar *Kekuasaan dan Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 276.

Menurut Zakiyyudin Baidowi, pendidikan multikultural adalah suatu cara untuk mengajarkan keragaman. Pendidikan multikultural menghendaki rasionalisasi etnis, intelektual, sosial dan pragmatis secara inter-relatif: yaitu mengajarkan ideal-ideal inklusivisme, pluralisme, dan saling menghargai semua orang dan kebudayaan merupakan imperatif humanistik yang menjadi prasyarat bagi kehidupan etnis dan dunia manusia yang beragam, mengintegrasikan studi tentang fakta-fakta, sejarah, kebudayaan, nilai-nilai, struktur, perspektif, dan kontribusi semua kelompok ke dalam kurikulum sehingga dapat membangun pengetahuan yang lebih kaya, kompleks, dan akurat tentang kondisi kemanusiaan di dalam dan melintasi konteks waktu, ruang dan kebudayaan tertentu.⁷

Adapun Howard dalam wacana Farida Hanum, berpendapat bahwa pendidikan multikultural memberi kompetensi multikultural. Pada masa awal kehidupan siswa, waktu banyak dilalui di daerah etnis dan kulturnya masing-masing. Kesalahan dalam mentransformasi nilai, aspirasi, etiket dari budaya tertentu, sering berdampak pada primordialisme kesukuan, agama, dan golongan yang berlebihan.

Faktor ini penyebab timbulnya permusuhan antar etnis dan golongan. Melalui pendidikan multikultural sejak dini diharapkan anak mampu menerima dan memahami perbedaan budaya yang berdampak pada perbedaan *usage* (cara individu bertingkah laku), *folkways* (kebiasaan-kebiasaan yang

⁷Zakiyuddin, Baidhawi, *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural*, (Jakarta: Erlangga, 2007), 8.

ada di masyarakat), *mores* (tata kelakuan di masyarakat), dan *customs* (adat istiadat suatu komunitas).⁸

Selain itu James Banks berpendapat bahwa pendidikan multikultural merupakan suatu rangkaian kepercayaan (*set of beliefs*) dan penjelasan yang mengakui dan menilai pentingnya keragaman budaya dan etnis di dalam bentuk gaya hidup, pengalaman sosial, identitas pribadi, kesempatan pendidikan dari individu, kelompok maupun negara.

Banks juga mendefinisikan pendidikan multikultural adalah ide, gerakan, pembaharuan pendidikan dan proses pendidikan yang tujuan utamanya adalah untuk mengubah struktur lembaga pendidikan supaya siswa baik pria maupun wanita, siswa berkebutuhan khusus, dan siswa yang merupakan anggota dari kelompok ras, etnis, dan kultur yang bermacam-macam itu akan memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai prestasi akademis di sekolah.

Bahkan Banks meyakini bahwa sebagian dari pendidikan lebih mengarah pada mengajari bagaimana berpikir daripada apa yang dipikirkan. Ia menjelaskan bahwa siswa harus diajari memahami semua jenis pengetahuan, aktif mendiskusikan konstruksi pengetahuan (*knowledge construction*) dan interpretasi yang berbeda-beda. Siswa yang baik adalah siswa yang selalu mempelajari semua pengetahuan dan turut serta secara aktif dalam membicarakan konstruksi pengetahuan. Siswa juga perlu disadarkan bahwa di dalam pengetahuan yang diterima itu terdapat beraneka ragam interpretasi

⁸Farida Hanum, Wacana: Pendidikan Multikultural Dalam Pluralisme Bangsa, *Makalah Lepas*, 4.

yang sangat ditentukan oleh kepentingan masing-masing, mungkin saja interpretasi itu nampak bertentangan sesuai dengan sudut pandang pandangnya. Siswa harus dibiasakan menerima perbedaan.

Pendidikan multikultural merupakan suatu wacana lintas batas. Dalam Pendidikan multikultural terkait masalah-masalah keadilan sosial (*social justice*), demokrasi, dan hak asasi manusia. Tidak mengherankan apabila Pendidikan Multikultural berkaitan dengan isu-isu politik, sosial, kultural, moral, edukasional dan agama.⁹

Ada dua istilah penting yang sangat berdekatan secara makna dan merupakan suatu perkembangan yang berkesinambungan, yakni pendidikan multietnik dan pendidikan multikultural. Pendidikan multietnik sering dipergunakan di dunia pendidikan sebagai salah satu usaha sistematis dan berjenjang dalam rangka menjembatani kelompok-kelompok rasial dan kelompok-kelompok etnik yang berbeda dan memiliki potensi untuk melahirkan ketegangan dan konflik. Sementara pendidikan multikultural menurutnya memperluas payung pendidikan multietnik sehingga memasukkan isu-isu lain seperti relasi gender, hubungan antar agama, kelompok kepentingan, kebudayaan subkultur, serta bentuk-bentuk dari keragaman.¹⁰

Multikulturalisme pada dasarnya merupakan konsep di mana sebuah komunitas dalam konteks kebangsaan dapat mengakui keragaman, perbedaan dan keanekaragaman baik berupa budaya, ras, suku, etnis, maupun agama dan kepercayaan. Sebuah konsep yang memberikan pemahaman mengenai suatu

⁹H.A.R Tilaar *Kekuasaan dan Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 206-207

¹⁰Zakiyuddin, Baidhawi, *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural*, 8

bangsa yang dipenuhi dengan budaya-budaya yang beragam (multikultural). Bangsa yang multikultural ialah bangsa dengan kelompok-kelompok etnis atau budaya yang di dalamnya dapat hidup berdampingan secara damai dalam prinsip *co-existence* yang ditandai oleh kesediaan menghormati budaya lain.¹¹

Blum dalam Yaya Suryana dan Rusdina mengatakan bahwa multikulturalisme meliputi sebuah pemahaman, penghargaan, penilaian atas budaya seseorang serta sebuah penghormatan dan keinginan tentang budaya etnis orang lain. Multikulturalisme meliputi sebuah penilaian terhadap kebudayaan orang lain, bukan dalam menyetujui seluruh aspek dari kebudayaan tersebut, melainkan mencoba melihat kebudayaan tertentu dapat mengeksekusi nilai bagi anggotanya.¹²

Mundzier Suparta dalam bukunya *Islamic Multicultural Education*, mencatat lebih dari sepuluh definisi tentang pendidikan multikultural¹³, diantaranya adalah; (a) Pendidikan Multikultural adalah sebuah filosofi yang menekankan pada makna penting, legitimasi dan vitalitas keragaman etnik dan budaya dalam membentuk kehidupan individu, kelompok maupun bangsa; (b) Pendidikan Multikultural adalah menginstitutionalkan sebuah filosofi pluralisme budaya ke dalam system pendidikan yang didasarkan pada prinsip-prinsip persamaan (*equality*), saling menghormati dan menerima, memahami dan adanya komitmen moral untuk sebuah keadilan sosial; (c) Pendidikan Multikultural adalah sebuah pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang

¹¹ Ngainun Naim dan Achmad Sauqi, *Pendidikan Multikultural: Konsep, dan Aplikasi...*, 126

¹² Yaya Suryana dan Rusdiana, *Pendidikan Multikulturalisme: Suatu Upaya Penguatan Jati Diri Bangsa: Konsep, Prinsip dan Implementasi*, 194-195.

¹³ John W. Santrock, *Psikologi Pendidikan, Terj. Tri Wibowo B.S.* (Jakarta: Kencana, 2007), 184

didasarkan atas nilai-nilai demokratis yang mendorong berkembangnya pluralisme budaya; dalam hampir seluruh bentuk komprehensifnya. Pendidikan multikultural merupakan sebuah komitmen untuk meraih persamaan pendidikan, mengembangkan kurikulum yang menumbuhkan pemahaman tentang kelompok-kelompok etnik dan memberangus praktik-praktek penindasan; (d) Pendidikan Multikultural merupakan reformasi sekolah yang komprehensif dan pendidikan dasar untuk semua anak didik yang menentang semua bentuk diskriminasi dan intruksi yang menindas dan hubungan antar personal di dalam kelas dan memberikan prinsip-prinsip demokratis keadilan sosial.

Lalu Blum juga berpendapat bahwa pendidikan multibudaya sarat dengan penghargaan, penghormatan dan kebersamaan dalam suatu komunitas yang majemuk. Lebih lanjut Blum menegaskan bahwa pendidikan multibudaya meliputi sebuah pemahaman, penghargaan dan penilaian atas budaya seseorang, dan sebuah penghormatan dan keingintahuan tentang budaya etnis orang lain. Ia meliputi penilaian terhadap kebudayaan-kebudayaan orang lain, bukan dalam arti menyetujui seluruh aspek dari kebudayaan-kebudayaan tersebut, melainkan mencoba melihat bagaimana kebudayaan tertentu dapat mengekspresikan nilai bagi anggota-anggotanya sendiri¹⁴.

¹⁴A. Lawrence Blum, *Antirasisme, Multikulturalisme, dan Komunitas Antar Ras, Tiga Nilai Yang bersifat Mendidik Bagi Sebuah Masyarakat Multikultural*, dalam Larry May, dan Shari Colins-Chobanian, *Etika Terapan: Sebuah Pendekatan Multikultural*, Alih Bahasa: Sinta Carolina dan Dadang Rusbiantoro (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001), 16

Blum juga membagi tiga elemen dalam pendidikan multibudaya, *pertama*, menegaskan identitas kultural seseorang, mempelajari dan menilai warisan budaya seseorang. *Kedua*, menghormati dan berkeinginan untuk memahami serta belajar tentang etnik/kebudayaan-kebudayaan selain kebudayaannya. *Ketiga*, menilai dan merasa senang dengan perbedaan kebudayaan itu sendiri; yaitu memandang keberadaan dari kelompok-kelompok budaya yang berbeda dalam masyarakat seseorang sebagai kebaikan yang positif untuk dihargai dan dipelihara.¹⁵

Tilaar juga menyimpulkan, pendidikan multikultural berawal dari berkembangnya gagasan dan kesadaran tentang “interkulturalisme” sesuai perang dunia II. Kemunculan gagasan dan kesadaran “interkulturalisme” ini selain terkait dengan perkembangan politik internasional menyangkut HAM, kemerdekaan dari kolonialisme, dan diskriminasi rasial dan lain-lain, juga karena meningkatnya pluralitas di negara-negara Barat sendiri sebagai akibat dari peningkatan migrasi dari negara-negara baru merdeka ke Amerika dan Eropa.

Mengenai fokus pendidikan multikultural, Tilaar mengungkapkan bahwa dalam program pendidikan multikultural, fokus tidak lagi diarahkan semata-mata kepada kelompok rasial, agama dan kultural domain atau mainstream. Fokus seperti ini pernah menjadi tekanan pada pendidikan interkultural yang menekankan peningkatan pemahaman dan toleransi individu-individu yang berasal dari kelompok minoritas terhadap budaya

¹⁵ Ibid, 19

mainstream yang dominan, yang pada akhirnya menyebabkan orang-orang dari kelompok minoritas terintegrasi ke dalam masyarakat mainstream. Pendidikan Multikultural sebenarnya merupakan sikap “peduli” dan mau mengerti (*difference*), atau “*politics of recognition*” politik pengakuan terhadap orang-orang dari kelompok minoritas.¹⁶

Pendidikan Multikultural melihat masyarakat secara lebih luas. Berdasarkan pandangan dasar bahwa sikap “*indifference*” dan “*Non-recognition*” tidak hanya berakar dari ketimpangan struktur rasial, tetapi paradigma Pendidikan Multikultural mencakup subjek-subjek mengenai ketidakadilan, kemiskinan, penindasan dan keterbelakangan kelompok-kelompok minoritas dalam berbagai bidang: sosial, budaya, ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya. Paradigma seperti ini akan mendorong tumbuhnya kajian-kajian tentang “*ethnic studies*” untuk kemudian menemukan tempatnya dalam kurikulum pendidikan sejak dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Tujuan inti dari pembahasan tentang subjek ini adalah untuk mencapai pemberdayaan (*empowerment*) bagi kelompok-kelompok minoritas dan *disadvantaged*.¹⁷

Pendidikan multikultural juga memandang manusia sebagai makhluk makro yang tidak akan terlepas dari akar budaya dan kelompok etnisnya.¹⁸

Fuad Ihsan dalam kajian dan pemikiran tentang pendidikan ada 2 istilah yang hampir sama bentuknya dan sering dipergunakan dalam dunia

¹⁶Lihat Azumardi Azra, “*Identitas dan Krisis Budaya, Membangun Multikulturalisme Indonesia*”, dalam [http://budpar.go.id/agenda/precongress/makalah/abstrak/58 % 20 azra.htm](http://budpar.go.id/agenda/precongress/makalah/abstrak/58%20azra.htm), diakses 10 Agustus 2020

¹⁷Ibid, 27

¹⁸Choirul Mahfud, *Pendidikan Multikultural*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006), 187.

pendidikan yaitu; Pedagogik yang berarti pendidikan dan pedagonik yang berarti Ilmu pendidikan. Driyarkara memaknai pendidikan sebagai upaya memanusiaikan manusia muda. Pengangkatan manusia ke taraf insani itulah yang disebut mendidik. Ki Hadjar Dewantara merumuskan pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (intelekt), dan tubuh anak. Dalam *Dictionary of Education* menyebutkan bahwa pendidikan adalah proses dimana seseorang mengembangkan kemampuan sikap dan bentuk-bentuk tingkah laku lainnya didalam masyarakat di mana ia hidup, proses sosial di mana orang dihadapkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol (khususnya yang datang dari sekolah), sehingga ia dapat memperoleh atau mengalami perkembangan kemampuan sosial, dan perkembangan individu yang optimum. Untuk lebih lengkap tentang pengertian pendidikan dan ruang lingkupnya baca buku.¹⁹

Alo Liliweri M.S. (2003: 7-9), dalam bukunya *Makna Budaya dalam Komunikasi Antarbudaya*, mengutip lebih dari lima makna kebudayaan. *Pertama*, menurut Iris Varner dan Linda Beamer, dalam *Inter-cultural Communication in the Global Workplace*, mengartikan kebudayaan sebagai pandangan yang koheren tentang sesuatu yang dipelajari, yang dibagi, atau yang dipertukarkan oleh sekelompok orang. Pandangan itu berisi apa yang mendasari kehidupan, apa yang menjadi derajat kepentingan, tentang sikap

¹⁹ Fuad Ihsan dalam Zahara Idris, *Dasar-Dasar Kependidikan*, (Padang: Angkasa Raya, 1987), 4-5

mereka yang tepat terhadap sesuatu, gambaran suatu perilaku yang harus diterima oleh sesama atau yang berkaitan dengan orang lain.

Kedua, kebudayaan, dalam arti yang luas, adalah perilaku yang telah tertanam, ia merupakan totalitas dari sesuatu yang dipelajari manusia, akumulasi dari pengalaman yang dialihkan secara sosial (disosialisasikan), tidak sekedar sebuah catatan ringkas, tetapi dalam bentuk perilaku melalui pembelajaran sosial (*Social Learning*).

Ketiga, kebudayaan adalah komunikasi simbolis, simbolisme itu adalah ketrampilan kelompok, pengetahuan, sikap, nilai, dan motif. Makna dari simbol-simbol itu dipelajari dan disebarluaskan dalam masyarakat melalui institusi.

Secara umum, multikultural berarti paham keberagaman (majemuk) terhadap kultur (adat) yang dimiliki oleh sebuah komunitas. Keberagaman di sini meliputi keberagaman suku, agama, ras dan adat istiadat. Di Indonesia, diskursus multikultural dalam aspek pluralisme khususnya Islam dan pluralisme merupakan tema yang banyak menjadi sorotan dari para cendekiawan pada dekade 1980-an, bahkan sampai hari ini.

Urgensi memperbincangkan diskursus pluralisme berangkat dari kondisi obyektif bangsa Indonesia yang memiliki tingkat kemajemukan yang cukup tinggi, baik secara fisik (negara kepulauan) maupun sosial budaya; bukan saja suku, bahasa, adat istiadat, bahkan agama yang menunjukkan tingkat heterogenitas yang cukup signifikan.²⁰

²⁰ Samsul Nizar, *Sejarah dan Pergolakan Pemikiran Pendidikan Islam: Potret Timur Tengah Era Awal dan Indonesia*, (Ciputat: PT Ciputat Press Group, 2005), 215-216

Dalam perspektif yang lebih luas, isu multikultural dalam aspek pluralisme perspektif Islam mengandung simplifikasi yang luar biasa, bahkan seringkali mengalami reduksi dan terkesan liberal. Di antaranya adalah: *pertama*, memang Islam agama wahyu, namun pemahaman orang terhadap Islam bisa bermacam-macam (*multi interpretation*). Kesalahpahaman ini bukan saja di kalangan umat Islam, tapi juga pada pengamat-pengamat asing yang sering memandang Islam dengan wajahnya yang tunggal, termasuk dalam memandang pluralisme. Sifat multi interpretasi terhadap Islam memungkinkan terjadinya diversifikasi terhadap pemahaman keagamaan, baik pada tingkat kognisi maupun aksi.

Kedua, di samping agama wahyu, Islam merupakan produk sejarah. Oleh karena itu, prinsip-prinsip ilmu sejarah dapat digunakan untuk melihat tahapan-tahapan perkembangan Islam. Dalam kaitan ini juga orang bisa melihat teks-teks ajaran agama dengan menggunakan kritik historis, fenomenologi dan sebagainya.

Ketiga, dialektika Islam dengan dunia luar telah melahirkan sebuah sudut pandang baru terhadap Islam dengan dunia luar telah melahirkan sebuah sudut pandang baru terhadap Islam yang terkadang keluar dari mainstream esensialnya.²¹

Ketiga hal tersebut telah mendorong lahirnya generasi baru Islam yang melihat dan memahami agamanya tidak semata-mata sebagai ‘realitas wahyu’ tapi juga sebagai realitas sosial. Generasi baru tersebut memahami Islam

²¹ Ibid, 216

secara liberal dengan melepaskan diri dari kungkungan masa lalunya. Gerakan pemikiran semacam ini merambah hampir di semua wilayah Islam. Di Indonesia, ide-ide Islam yang demikian telah digandrungi dan bahkan menjadi trend peminat kajian ke-Islaman. Namun demikian, bukan berarti Islam dapat dimaknai secara serampangan dan bisa diwarnai oleh multikultural yang diciptakan manusia.²²

Dalam paragraf di atas menggunakan metode dogmatik yaitu pendekatan yang melihat pendidikan agama sebagai media transmisi ajaran dan keyakinan agama. Tujuannya adalah terwujudnya komitmen dogmatik peserta didik terhadap agamanya. Kelemahan pendekatan ini terletak pada potensinya untuk menumbuhkan fanatisme keagamaan yang tidak pada tempatnya.

Di masa depan, keberlakuan ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat akan ditentukan oleh komitmen etik kemanusiaan dalam susunan konstitusi yang tidak lagi terperangkap pada bentuk-bentuk simbolik yang sering disebut sebagai syariah. Dalam kehidupan politik yang semakin terbuka dan demokratis juga sulit diapresiasi prinsip normatif *siyasah* (politik) dalam format klasik. Hal ini merupakan akibat logis dari tumbuhnya pola hidup baru yang bersifat global dan multikultural yang juga menjadi dasar etika sosial.²³

Masalahnya ialah kesediaan masyarakat Islam untuk melakukan kritik dengan meletakkan seluruh tradisi intelektual dan keberagaman yang selama ini dijadikan referensi utama yang dibakukan sebagai sesuatu yang terbuka.

²² Ibid, 217

²³ Abdul Munir Mulksam, *Strategi Sufistik Semarang*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2003), 302

Gejala ideologisasi bagi semua pengalaman intelektual dan keagamaan yang relatif dan parsial perlu dibedakan dari universitas wahyu yang mutlak. Dari sini baru mungkin digagas pengembangan masyarakat Islam berdasar prinsip-prinsip etik yang bisa dan menarik di apresiasi oleh setiap kelompok masyarakat yang berbeda latar belakang budaya dan keagamaan di dalam sebuah kehidupan dunia yang terbuka, demokrasi dan global.²⁴

Al-Qur'an sebagai landasan agama diturunkan untuk semua manusia yang diciptakan oleh Allah SWT. Agar mereka dapat mengarungi kehidupan ini (di dunia) hingga akhirat nanti. Sedangkan, manusia di muka bumi ini sangat bermacam-macam bentuknya dan latar belakang yang berbeda-beda. al-Qur'an bukan hanya untuk orang Islam melainkan untuk seluruh makhluk Allah, untuk meraih kehidupan bahagia di dunia dan akhirat.

B. Pandangan Islam tentang Pendidikan Multikultural

Sebagaimana yang dikutip oleh Sukron Kamil, yang menyetujui adanya prinsip-prinsip demokrasi dalam Islam tetapi di lain pihak mengakui adanya perbedaan di antara kalangan Islam. Menurut Nurcholis, dalam bahasa budaya, demokrasi bukanlah kata benda tetapi lebih merupakan kata kerja, sebagai proses demokratisasi. Demokrasi adalah suatu kategori dinamis. Ia senantiasa bergerak atau berubah, kadang negatif (mundur), kadang positif (berkembang maju).²⁵

²⁴ Ibid, 303

²⁵ Sukron Kamil, *Islam dan Demokrasi Telaah Konseptual dan Historis*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), 27.

Dari nilai-nilai pendidikan multikultural tentang penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia. Islam berprinsip egalitarianisme (persamaan) atau dipertahankannya penghormatan pada hak-hak non muslim dan segi hak-hak perempuan.

Sebagaimana dikutip oleh Idris Thaha meminjam pendapat Amien Rais, kita tidak hanya memerlukan tauhid-akidah, tetapi juga tauhid sosial.²⁶ Tauhid sosial secara sederhana dapat diartikan dengan penegakan keadaan sosial di dalam masyarakat. Manusia tauhid dan umat tauhid memikul kewajiban untuk menegakkan suatu orde sosial yang adil dan etis. Banyak ayat al-Qur'an yang memerintahkan manusia untuk mengutuk ketimpangan ekonomi dan ketidakadilan, dan menyuruh manusia untuk menegakkan suatu tatanan sosial yang etis dan egalitarian.

Dalam kajian Islam sebagai suatu perangkat ajaran dan nilai, tentunya kita semua setuju, bahwa memang Islam telah meletakkan konsep dan doktrin yang memberikan rahmat bagi *al-alamin*. Islam sebagai ajaran yang memuat nilai-nilai normatif, begitu bagusnya dalam memandang dan menempatkan martabat dan harkat manusia, baik sebagai individu maupun sebagai anggota sosial.²⁷

Pada awal memulai kehidupan di Madinah, langkah pertama yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW adalah menyatukan masyarakat di madinah dan sekitarnya yang terdiri dari beberapa suku dan agama. langkah strategis ini yang melahirkan “Piagam Madinah” yang meletakkan dasar-dasar

²⁶ Idris Thaha, *Demokrasi Religius*, (Jakarta: Teraju, 2004), 141.

²⁷ Muhammad Tholhah Hasan, *Islam dalam Perspektif Sosio Kultural*, (Jakarta: Lantabora Press, 2005), 142.

kehidupan berbangsa dan bernegara bagi masyarakat majemuk. Dalam Piagam Madinah tersebut diatur hubungan antara sesama anggota komunitas Islam, dan antara anggota komunitas Islam dengan komunitas lainnya.

Pendidikan multikultural memegang peranan dan posisi yang strategis dalam rangka mensukseskan pencapaian tujuan yang bernuansa pada keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di samping itu pendidikan multikultural berupaya untuk mensosialisasikan, menanamkan dan menghargai nilai-nilai kemajemukan. Setiap siswa ditanamkan untuk menerima keragaman dalam kehidupan yang harmonis dan saling menolong.²⁸

Begitu juga dengan Islam yang mengenal istilah persamaan derajat dan martabat manusia pada umumnya. Sejak semula, salah satu prinsip dalam Islam adalah menjunjung tinggi martabat manusia, dan menempatkannya dalam status supremasi di antara makhluk Tuhan lainnya. Referensi konseptual dalam masalah ini meyakinkan, seperti tertera dalam ayat Al-Qur'an surah al-Isra ayat 70 yaitu:

﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ

وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

Artinya: *“Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari*

²⁸Achmaduddin, *Edukasi Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan, Volume 4, Nomor I*, (Jakarta: Puslitbang Pendidikan Agama, 2006), 44.

yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan."²⁹

Dalam melakukan prinsip kemanusiaan, Islam mendeklarasikan sikap dasar kemanusiaan yang sesuai dengan pendidikan multikultural yang bertujuan memanusiaikan manusia. Dalam Islam persamaan mencakup dalam hukum, proses peradilan, pemberian status sosial dan pengenaan hak harta. Pandangan Islam dalam masalah ini menggunakan paradigma moral dan pendekatan kultural dan humanis.

Perbedaan pandangan dalam menyikapi perbedaan yang ada itu juga muncul dari beberapa kelompok dalam kehidupan masyarakat muslim. Apalagi masyarakat Indonesia yang disusun oleh mayoritas masyarakat muslim.

Setidaknya masyarakat muslim yang konon katanya adalah masyarakat yang mencintai perdamaian menjadi tonggak utama dan tolak ukur dalam menggalakkan perdamaian dan kerukunan dalam kehidupan di dunia ini.

Agama Islam sebagai suatu perangkat ajaran dan nilai, meletakkan konsep dan doktrin yang memberikan rahmat bagi *al-'alamin*. Islam sebagai ajaran yang memuat nilai-nilai normatif, sarat dengan ajaran yang menghargai dimensi pluralis-multikultural begitu bagus dalam memandang dan menempatkan martabat dan harkat manusia, baik sebagai individu maupun sebagai anggota sosial.

²⁹Imam Jalaluddin Al-Mahalliy, Imam Jalaluddin As-Suyuthi, *Terjemah Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1990), 1154

Menurut Anis Malik Thoha perspektif islam dalam pembelajaran multikultural meliputi pembelajaran terhadap tema-tema berikut meliputi: (1) tauhid; (2) pluralitas sebagai *sunatullah*; (3) kebebasan beragama; (4) pluralitas (yang) memerlukan *frame of referensi*. Upaya internalisasi terhadap pemahaman multikulturalisme dapat dilakukan dengan membelajarkan tema-tema tersebut kepada peserta didik, karena islam sendiri menjelaskan tentang perspektif islam terhadap keberadaan yang lain (*the existense of other*) sebagai sebuah dasar-dasar teoritis. Bahkan masalah ini mendapatkan perhatian yang cukup serius dalam pembahasan di al-Qur'an dan al-sunah.³⁰

Muhammad Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya al-Misbah menjelaskan, "al-Qur'an demikian menghargai bahasa dan keragamannya, bahkan mengakui penggunaan bahasa lisan yang beragam. Perlu ditandaskan bahwa dalam konteks pembicaraan tentang paham kebangsaan, al-Qur'an sangat menghargai bahasa. Bahasa pikiran dan bahasa perasaan jauh lebih penting ketimbang bahasa lisan, sekalipun bukan berarti mengabaikan bahasa lisan, karena sekali lagi ditekankan bahwa bahasa lisan adalah jembatan perasaan. Atas dasar semua itu, terlihat bahwa bahasa saat dijadikan sebagai perekat dan kesatuan umat, dapat diakui oleh al-Qur'an, bahkan inklusif dalam ajarannya. Bahasanya dan keragamannya merupakan salah satu bukti ke-Esaan dan kebesaran Allah."³¹

³⁰ Dody S. Truna, *Pendidikan Agama Islam Berwawasan Multikulturalisme*, (Jakarta: Kementerian Agama, 2010), hlm. 45.

³¹ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan dan Keresasian Al-Qur'an*, Vol.1, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 340-342.

Sayyid Qutb juga pernah menyinggung dalam kitab tafsirnya *Fi Zhilalil Qur'an*, “Dahulu manusia itu adalah umat yang satu, pada satu *manhaj* “jalan hidup” dan satu pandangan. Hal ini boleh juga mengisyaratkan kepada sekelompok kecil manusia pertama yang berupa keluarga Adam dan Hawa dengan anak- anak cucunya, sebelum terjadinya perbedaan mengenai persepsi, pola pikir, pandangan hidup dan keyakinan mereka.

Maka al-Qur'an menetapkan bahwa asal mula manusia itu satu. Mereka adalah anak dari keturunan pertama, keluarga Adam dan Hawa. Allah menghendaki menjadikan seluruh manusia ini produk dari sebuah keluarga yang kecil, untuk menetapkan prinsip kekeluargaan dalam kehidupan mereka, dan menjadikan keluarga sebagai fondasi pertama bangunan masyarakat. Pada waktu itu berbeda- beda pola pikir, arah pandangan, dan banyaklah sistem kehidupan, serta beraneka ragamlah kepercayaan mereka. Pada saat demikian, Allah mengutus para Nabi untuk memberikan kabar gembira dan peringatan: *“Allah menurunkan bersama mereka kitab dengan benar untuk memberi keputusan diantara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan”*.

Di sini tampaklah hakikat yang besar itu bahwa di antara tabiat manusia ialah berselisih. Karena, perbedaan itu merupakan salah satu unsur pokok kejadian mereka, yang mewujudkan hikmah yang tinggi dengan dijadikannya mereka sebagai pengelola bumi ini. Perbedaan- perbedaan ini memerlukan kegiatan-kegiatan yang bermacam- macam dan persiapan yang bermacam-macam pula, agar saling melengkapi, saling membentuk, dan

menunaikan peranannya yang global dalam mengelola dan memakmurkan bumi ini, sesuai dengan keputusan umum yang ditentukan dalam ilmu Allah.

Oleh karena itu terdapat bermacam-macam pendapat dan pemikiran di dalam menghadapi aktifitas-aktifitas yang beraneka macam itu. Perbedaan dalam persiapan dan aktifitas ini menimbulkan perbedaan dalam pandangan, sistem dan jalan hidup. Akan tetapi, Allah ingin memberikan perbedaan-perbedaan yang terjadi dalam bingkai yang luas dan meliputi seluruh mereka manakala itu berjalan dengan baik dan lurus. Bingkai yang besar itu ialah bingkai pandangan iman yang benar dan luas sehingga mencakup bermacam-macam persiapan, potensi dan kekuatan. Maka pandangan iman ini tidak membunuh dan mengekangnya, tetapi justru menatanya, mengaturnya dan mendorongnya ke jalan kebaikan. Oleh karena itu harus ada timbangan yang mantap untuk menjadi tempat kembalinya orang-orang yang berselisih itu, hukum yang adil dan menjadi rujukan orang-orang yang bersilang sengketa, dan kata pasti untuk menyelesaikan perdebatan, serta menjadi acuan semua pihak secara meyakinkan.³²

Pendidikan Multikultural juga senada dengan tujuan agama yang berbunyi: “Tujuan umum syari’ah Islam adalah mewujudkan kepentingan umum melalui perlindungan dan jaminan kebutuhan-kebutuhan dasar (*al-daruriyyah*) serta pemenuhan kepentingan (*al-hajiyyat*) dan penghiasan (*tahsiniyyah*) mereka.”³³ Dari konsep inilah kemudian tercipta sebuah konsep *al-daruriyyah al-khamsah* (lima dasar kebutuhan manusia), yang meliputi jiwa

³²Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur’an, Jilid I*, (Jakarta: Gema Insani, 2020), 256-257.

³³Abd al-Wahhab Khalaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1978), 198.

(*al-nafs*), akal (*al-aql*), kehormatan (*al-'irdh*), harta benda (*al-mal*), dan agama (*al-din*).³⁴

C. Urgensi Pendidikan Multikultural

Untuk mewujudkan multikulturalisme dalam dunia pendidikan, maka pendidikan multikultural juga perlu dimasukkan kedalam kurikulum nasional, yang pada akhirnya dapat menciptakan tatanan masyarakat Indonesia yang multikultural, serta upaya-upaya lain yang dapat dilakukan guna mewujudkannya.

Karena begitu pentingnya pendidikan multikultural dengan adanya penindasan atau penafikan atas dasar kepemilikan etnis, agama atau bentuk minoritas lainnya. Dikotomi antar kita (kelompok dominan) dan mereka (di luar kelompok dominan) dilembagakan dalam rangka menjauhkan kelompok minoritas dari posisi kekuasaan. Pelembagaan diskriminasi ini terjadi di wilayah-wilayah penting dalam kehidupan seperti pekerjaan, pendidikan, jabatan-jabatan publik dan hubungan-hubungan sosial.

Situasi sosial, kultural masyarakat kita akhir-akhir ini memang semakin mengkhawatirkan. Ada berbagai macam peristiwa dalam pendidikan yang semakin merendahkan harkat dan derajat manusia. Hancurnya nilai-nilai moral, merebaknya ketidakadilan, tipisnya rasa solidaritas dan lain-lain telah terjadi dalam lembaga pendidikan kita.

³⁴ Masykuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respons Intelektual Muslim Indonesia terhadap Konsep Demokrasi 1966-1993*, 102.

Hal ini mewajibkan kita untuk mempertanyakan sejauh mana lembaga pendidikan kita telah menjawab dan tanggap atas berbagai macam persoalan dalam masyarakat kita. Ada apa dengan pendidikan kita sehingga manusia dewasa yang telah lepas dari lembaga pendidikan formal tidak mampu menghidupi gerak dan dinamika masyarakat yang lebih membawa berkah dan kebaikan bagi semua orang.

Pentingnya pendidikan multikultural yaitu:

1. Sebagai Sarana Alternatif Pemecahan Konflik

Meluasnya disintegrasi sosial merupakan salah satu fenomena krusial yang telah membuat negeri ini terbengkalai. Konflik horizontal antar suku, agama, ras, misalnya dan berbagai golongan sampai saat ini masih marak terjadi. Tragedi kekerasan antar kelompok yang meledak secara sporadis di akhir tahun 1990-an, misalnya, kemudian konflik kekerasan yang bernuansa politis, etnis dan agama seperti yang terjadi di berbagai wilayah Aceh, Maluku, Kalimantan Barat dan Tengah merupakan salah satu fakta yang tidak terbantahkan bahwa dalam lingkaran sosial bangsa Indonesia masih kokoh semangat narsistik-egosentrisnya.

Penyelenggaraan pendidikan multikultural di dunia pendidikan diyakini dapat menjadi solusi nyata bagi konflik dan disharmonisasi yang terjadi di masyarakat, khususnya yang kerap terjadi di masyarakat

Indonesia yang secara realitas plural. Dengan kata lain, pendidikan multikultural dapat menjadi sarana alternatif pemecahan konflik sosial budaya.

Secara sederhana, dalam pandangan multikulturalisme setiap budaya manusia atau kelompok etnik harus diposisikan sejajar dan setara. Tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih dominan.³⁵ Spektrum kultur masyarakat Indonesia yang amat beragam menjadi tantangan bagi dunia pendidikan guna mengolah perbedaan tersebut menjadi suatu asset, bukan sumber perpecahan.

Saat ini, Pendidikan Multikultural mempunyai dua tanggungjawab besar, yaitu: menyiapkan bangsa Indonesia untuk siap menghadapi arus budaya luar di era globalisasi dan menyatukan bangsa sendiri yang terdiri dari berbagai macam budaya.

Dengan demikian, sebagaimana telah diperlihatkan dalam sejarah Indonesia dimasa lampau, kemajemukan itu tidak menimbulkan konflik masyarakat, apalagi kerusuhan sosial. Sebaliknya bahkan menjadi himpunan kekuatan bangsa dalam menumbuhkan semangat nasionalisme. Kemajemukan itu malah telah menjadi slogan persatuan dan kesatuan bangsa; *Bhineka Tunggal Ika*.³⁶

2. Supaya Siswa Tidak Tercerabut dari Akar Budaya

Dalam era globalisasi saat ini, pertemuan antar-budaya menjadi “ancaman” serius bagi anak didik. Untuk mensikapi realitas global

³⁵ Lihat dalam berita Media Indonesia, Senin, 29 November 2018

³⁶ Syamsul Ma'arif, *The Beauty of Islam Dalam Cinta dan Pendidikan Pluralisme* (Semarang; NEED'S PRESS, 2008), 83

tersebut, siswa hendaknya diberi penyadaran akan pengetahuan yang beragam, sehingga mereka memiliki kompetensi yang luas akan pengetahuan global, termasuk aspek kebudayaan. Mengingat beragamnya realitas kebudayaan di negeri ini, dan luar negeri, siswa pada era globalisasi ini sudah tentu perlu diberi materi tentang pemahaman banyak budaya atau pendidikan multikultural.³⁷

Manusia mengembangkan kebudayaan tidak lain sebagai upaya mempertahankan kelangsungan hidupnya menghadapi berbagai tantangan yang datang dari lingkungannya untuk kemudian mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Dalam hal ini, tidak serta merta meninggalkan tradisi yang telah ada.³⁸

Jadi, pendidikan multikultural di samping untuk memahami kebudayaan orang lain. Tetapi juga untuk menjaga kebudayaan diri sendiri. Oleh sebab itu, siswa tahu mana budaya yang baik untuk diambil dan mana yang harus ditinggalkan. Serta terbentuknya sifat saling menghargai terhadap kebudayaan masing-masing.

3. Menuju Masyarakat Multikultural

Dalam masyarakat multikultural ditegaskan, bahwa corak masyarakat Indonesia yang *bhinneka Tunggal Ika* ini bukan hanya di maksudkan pada keanekaragaman suku bangsa, melainkan juga keanekaragaman budaya yang ada dalam masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Eksistensi keberagaman kebudayaan tersebut selalu

³⁷ Chairul Mahfud, *Pendidikan Multikultural*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar), 211

³⁸ Sujarwa, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar, Manusia dan Fenomena Sosial Budaya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 198

dijaga/terjaga yang bisa tampak dalam sikap saling menghargai, menghormati, toleransi antara satu kebudayaan dengan kebudayaan lainnya.³⁹

Dalam konteks ini ditegaskan bahwa perbedaan bukan menjadi penghalang untuk bersatu padu meraih tujuan dan mewujudkan cita-cita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.⁴⁰

Keragaman sosial, baik dalam kelompok budaya maupun pemikiran (perbedaan pendapat) adalah bagian dari “*sunnat Allah*” bahkan dapat dikatakan, bahwa kehidupan ini ada karena dibangun atas keragaman. Oleh karena itu penyelesaiannya ialah membangun pemahaman yang utuh dan mengembangkan sikap arif dalam menyikapi perbedaan. Sehingga perbedaan akan menjadi kekuatan yang sinergis, saling mengisi dan melengkapi dalam membangun peradaban masa depan.⁴¹ Hubungan antar manusia ini dapat dibina dan dipelihara, antara lain dengan mengembangkan cara dan gaya hidup yang selaras dengan nilai dan norma yang disepakati bersama dalam masyarakat.⁴²

Dengan pendidikan yang demokratis akan lahir generasi masa depan yang tidak akan kehilangan konteks dan perannya di era keterbukaan dimasa yang akan datang. Perlu dipahami bahwa pendidikan yang demokratis tidak terpaku pola tertentu, dalam pengertian bahwa prinsip-prinsip demokrasi dapat ditanamkan sedini mungkin dalam sistem

³⁹ Subagyo, *DKK Pendidikan Kewarganegaraan*, (Semarang: UPT MKU UNNES, 2006), 121

⁴⁰ Sujarwa, *Ilmu*, 227

⁴¹ Abdul Wahid, *Isu-isu Kontemporer Pendidikan Islam*, (Semarang: NEED'S PRESS, 2008), 172

⁴² Muhammad Daud Ali, *Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 270

pendidikan kita, seperti kebebasan berpendapat, membangun tradisi ilmiah yang obyektif dan progresif, kultur dialog dan sebagainya. Maka, pendekatan dalam menyelenggarakan pendidikan dalam abad mendatang sangat diperlukan adanya model pendekatan yang beragam sebagai ganti model pendekatan yang serba seragam yang sudah tidak lagi sesuai dengan semangat demokrasi, keterbukaan, informasi dan kesetaraan.⁴³

Masyarakat multikultural dalam hal ini adalah proses melaksanakan nilai-nilai civility dalam kehidupan bermasyarakat. Masyarakat multikultural adalah proses menuju dan menjaga civil society (masyarakat madani) yang menghormati dan berupaya merealisasikan nilai-nilai demokrasi sebagai way of life-nya. Yang dimaksud dengan civil society di sini, yaitu wilayah-wilayah kehidupan yang bercirikan keterikatan pada norma-norma atau nilai hukum yang diakui, kesukarelaan, keswasembadaan, keswadayaan dan kemandirian yang tinggi berhadapan dengan masyarakat. Masyarakat yang demikian itulah sebagai rumah bagi demokrasi.

D. Tujuan Pendidikan Multikultural

Sebagaimana kita ketahui, bahwa bangsa Indonesia mempunyai filsafat hidup pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pun disusun atas dasar pancasila. Oleh karena itu, sudah selayaknya jika pendidikan di Indonesia juga berdasarkan pada pancasila, hingga kini, dasar

⁴³ Syamsul Ma'arif, *Pesantren Vs Kapitalisme Sekolah*, (Semarang: NEED'S PRESS, 2008), 57

dan tujuan pendidikan nasional secara yuridis masih sama, belum berubah. Tujuan pendidikan Nasional menurut UU 20 tahun 2003 adalah “ untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”⁴⁴

Sedangkan tujuan Pendidikan Multikultural yaitu:

1. Membangun Paradigma Keberagaman Inklusif

Paradigma keagamaan yang inklusif berarti lebih mementingkan dan menerapkan nilai-nilai agama dari pada hanya melihat dan mengagungkan simbol-simbol keagamaan. Paradigma pemahaman keagamaan aktif sosial berarti agama tidak hanya menjadi alat pemenuhan kebutuhan rohani secara pribadi saja. Akan tetapi yang terpenting adalah membangun kebersamaan dan solidaritas bagi seluruh manusia melalui aksi-aksi sosial yang nyata yang dapat meningkatkan kesejahteraan umat manusia.⁴⁵

Dengan membangun paradigma pemahaman keberagaman yang humanis, pluralis dan kontekstual diharapkan nilai-nilai universal yang ada dalam agama seperti kebenaran, keadilan, kemanusiaan, perdamaian dan kesejahteraan umat manusia dapat ditegakkan. Lebih khusus lagi, agar kerukunan dan kedamaian antar beragama dapat terbangun.

⁴⁴ Lebih jelas lihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2003 (Jakarta: Cemerlang, 2003), 7

⁴⁵ M. Ainul Yaqin, *Pendidikan Multikultural Cross-cultural Understanding untuk Demokrasi dan keadilan* (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), 57

2. Menghargai Keragaman Bahasa dan Etnis di Sekolah

Sikap sensitif terhadap masalah-masalah yang diskriminatif khususnya terhadap diskriminasi bahasa yang terjadi di sekolah. Maka niscaya usaha untuk membangun sikap siswa agar mereka dapat selalu menghargai orang lain yang mempunyai bahasa dan dialek yang berbeda, sedikit demi sedikit akan dapat tertanam dan kemudian tumbuh dengan baik.⁴⁶

Sekolah sebaiknya berperan aktif dalam membangun pemahaman dan kesadaran siswa tentang pentingnya sikap menghargai dan anti diskriminasi terhadap etnis lainnya dengan cara membuat pusat kajian atau forum dialog untuk mengagas hubungan yang harmonis antaretnis. Dengan adanya dialog atau kajian ini diharapkan akan terbangun pemahaman dan pandangan siswa yang lebih terbuka terhadap etnis lainnya. Atau bisa juga diadakan pekan atau hari khusus yang mengangkat karakter atau budaya semua etnis yang ada di sekolah tersebut. Dengan adanya kegiatan semacam ini siswa dapat memahami berbagai keunikan dan perbedaan karakteristik serta budaya dari masing – masing etnis.⁴⁷

3. Membangun Sikap Sensitif Gender

Dalam kehidupan sosial pun pria dan wanita mempunyai hak yang sama. Perannyalah yang berbeda sesuai kodrat yang dimiliki masing-masing.⁴⁸ Perbedaan jenis kelamin tidak hanya merupakan hal yang

⁴⁶ Ibid, 104

⁴⁷ Ibid, 223

⁴⁸ Baharudin Lopa, *Al Qur'an dan hak-hak asasi manusia* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1999), 66

berhubungan dengan warisan biologis. Masyarakat menuntut laki-laki dan perempuan untuk bertingkah laku berbeda sesuai dengan perannya masing-masing. Untuk memenuhi harapan ini, anak-anak harus memahami jenis kelamin mereka masing-masing dan mengintegrasikannya ke dalam konsep diri mereka. Dalam Islam, laki-laki juga diajarkan untuk melakukan tugas domestik untuk meringankan beban istri di rumah, jika mereka sedang di rumah.⁴⁹ Maka, diskriminasi yang berlandaskan pada perbedaan jenis kelamin (*gender*) dan sebagainya tidak memiliki dasar pijakan sama sekali dalam ajaran tauhid.⁵⁰

Dalam masyarakat Jawa tradisional yang masih kental dengan kultur patriarki, memasak adalah tugas perempuan yang menjadi bagian dari tugas utamanya sebagai ibu rumah tangga. Laki-laki, dalam masyarakat Jawa tradisional, dianggap kurang pantas bila berurusan dengan dunia masak memasak. Di sisi lain, dalam masyarakat Jawa yang lebih berpikir terbuka, urusan masak memasak tidak ada kaitannya dengan adanya anggapan pantas dan tidak pantas bagi laki-laki atau perempuan.

Urusan masak memasak, dalam kelompok masyarakat ini, sangat berkaitan erat dengan adanya “kesempatan” bagi keduanya. Karena kesibukan masing-masing pihak, baik perempuan atau laki-laki, apabila yang mempunyai kesempatan memasak adalah pihak laki-laki maka yang bertugas memasak adalah laki-laki, begitu pula sebaliknya.

⁴⁹ Aliah B, Purwakanian Hasan, *Psikologi Perkembangan Islami*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), 242

⁵⁰ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, (Yogyakarta: Lkis, 2009), 11

Lebih dari itu Abu Ishak al-Syatibi, dalam kutipan Saidani juga mengungkap tentang pentingnya pendidikan multikultural dengan perincian sebagai berikut:

a. Memelihara Agama

Agama sesuatu yang harus dimiliki oleh setiap manusia, supaya derajatnya terangkat dan memenuhi hajat jiwanya. Agama Islam harus terpelihara dari ancaman orang yang akan merusak akidah, syari'ah dan akhlak atau mencampuradukkan ajaran agama Islam dengan faham atau aliran yang batil. Agama Islam memberikan perlindungan kepada pemeluk agama lain untuk menjalankan agama sesuai dengan keyakinannya dan tidak memaksakan pemeluk agama lain meninggalkan agamanya untuk memeluk Islam.

b. Memelihara Jiwa

Jiwa harus dilindungi, untuk itu hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan hidupnya, dan dilarang melakukan sesuatu yang dapat menghilangkan jiwa manusia dan melindungi berbagai sarana yang digunakan oleh manusia untuk mempertahankan kemaslahatan hidupnya..

c. Memelihara akal

Memelihara akal adalah wajib hukumnya bagi seseorang, karena akal mempunyai peranan sangat penting dalam hidup dan kehidupan manusia. Dengan akal, manusia dapat mengembangkan ilmu pengetahuan

dan teknologi. Seseorang tidak akan mampu menjalankan hukum Islam dengan baik dan benar tanpa menggunakan akal yang sehat. Oleh karena itu Islam melarang orang meminum-minuman khamr, karena akan merusak akal.

d. Memelihara Keturunan

Dalam Islam, memelihara keturunan hal yang sangat penting. Untuk itu harus ada perkawinan yang dilakukan secara sah menurut ketentuan yang berlaku yang ada dalam al-Qur'an dan sunnah nabi dan dilarang melakukan perbuatan Zina. Hukum kekeluargaan dan kewarisan Islam dalam al-Qur'an merupakan hukum yang erat kaitannya dengan pemurnian keturunan dan pemeliharaan keturunan. Pemeliharaan keturunan berkaitan dengan perkawinan dan kewarisan disebutkan secara rinci dan tegas misalnya larangan-larangan perkawinan dan larangan berzina.

e. Memelihara Harta

Menurut hukum Islam, harta merupakan pemberian Allah kepada manusia untuk kesejahteraan hidup dan kehidupannya, untuk itu manusia sebagai khalifah (human duties) Allah di muka bumi diberi amanah untuk mengelola alam ini sesuai kemampuan yang dimilikinya, dilindungi haknya untuk memperoleh harta dengan cara yang halal, sah menurut hukum dan benar menurut ukuran moral, dan dipergunakan secara sosial.⁵¹

⁵¹Anwar Haryono, *Hukum Islam: Keluasan dan Keadilan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1968), 140